



**PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI NEGARA JEPANG PASCA PERANG
DUNIA II DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBELAJARAN SEJARAH
DI SEKOLAH MENENGAH ATAS PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
SEJARAH FKIP UNS**

Sri Wahyuni¹, Leo Agung S², Sri Wahyuni³

ABSTRACT

The objective of research was to find out: (1) the condition of education in Japan before Second World War, (2) the condition of education in Japan post-Second World War, and (3) the Relevance of education development in Japan post-Second World War to Historical learning in Senior High School based on the curriculum of 2013. The method employed in this research was historical one. Historical method was the process of examining and analyzing critically the recording and relics of the past. The preliminary stage conducted in historical research process was data collection or heuristic one. The data of research collected included primary and secondary data relevant to Education in Japan Post-Second World War. The data obtained was then analyzed. Data analysis started with verification or critique, interpretation and then historiography explanation.

Considering the result of research, the following conclusions could be drawn. (1) Japan Meiji Restoration brought about considerable change in Japan people' life particularly in education. Public elementary education started to be given priority, a number of universities and middle education institution and college was established. (2) Education System in Japan before Second World War included Elementary School in 6-year age constituting compulsory education, junior high education for 5 years, senior high education for 3 years, and university education for 3 years. (3) Japan Education system post-Second World War basically involved elementary school (six years), junior high school (three years), senior high school (three years), and university (four years). Education was compulsory in nature only for nine years, six in elementary and three in junior high schools. (4) Education policy and development in Japan was related to the material of Indonesian heroism revival and nationality during Japan occupation and colonialism age particularly the effect of education field on Indonesia.

Keywords: Meiji Restoration, Education System, Historical Learning

¹ Mahasiswa Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

² Dosen dan Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS

³ Dosen dan Pembimbing pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP UNS



PENDAHULUAN

Zaman yang paling dianggap penting bagi Jepang yaitu pada zaman Meiji yang berlangsung selama 44 tahun mulai dari 1868 hingga 1912 dengan diadakannya revolusi di semua aspek kehidupan masyarakat; yang paling penting yaitu dengan terbukanya negara Jepang bagi negara-negara lain setelah sekian lama negara Jepang menutup diri (politik isolasi) dari dunia luar. Pada tahun 1854 ketertutupan Jepang berhasil didobrak oleh Amerika dan sejak 1868 mulailah pembaharuan Jepang yang dilakukan secara besar-besaran. Pembaharuan ini dikenal dengan sebutan *Restorasi Meiji*. Restorasi Meiji ditandai dengan berakhirnya kekuasaan Tokugawa dengan pemerintahan Bakufu-nya. Kekuasaan kemudian diserahkan kembali pada Tenno (kaisar), yang pada waktu itu adalah Mutsuhito (Zulkarnain, 2008).

Jepang yang sudah membuka diri dan terlibat dalam dinamika kehidupan antarbangsa, mulai memperhatikan posisi dan relasinya dengan Negara-negara lainnya, di mana salah satu yang menjadi pusat perhatian Jepang adalah hubungannya dengan negara-negara Barat. Demi menjaga kelangsungan hidupnya dari ancaman negara-negara Barat, Jepang juga harus melakukan tindakan yaitu melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, sehingga Jepang dapat menjadi sebuah negara yang kuat dan tidak kalah bersaing dengan negara-negara Barat.

Para pemimpin Restorasi Meiji menyadari bahwa Jepang tidak akan mungkin mengejar ilmu pengetahuan dan teknologi Barat, kalau pendidikan melalui sekolah tidak diorganisasikan dan diselenggarakan dengan luas dan teratur. Oleh sebab itu sudah sejak tahun 1872, yaitu tahun ke-empat setelah permulaan masa Meiji ditetapkan kewajiban belajar bagi seluruh rakyat selama 4 tahun. Dalam Restorasi Meiji para pemimpin juga menyadari bahwa tidak hanya diperlukan basis yang luas berupa rakyat yang terdidik, tetapi juga diperlukan kemahiran-kemahiran teknis dan kader-kader pemerintahan serta dunia usaha. Karena itu, di samping memperhatikan bentuk pendidikan dasar, juga diadakan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi (Suryohadiprojo, 1982).

Pendidikan di Jepang sudah ada sebelum masa Meiji. Pada masa Tokugawa *Bakufu* (1603-1867) atau yang lebih dikenal dengan sebutan zaman Edo terdapat lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan sekolah-sekolah yang hanya untuk anak-anak dari kalangan Samurai. Sedangkan untuk rakyat biasa lembaga pendidikannya



disebut *terakoya* yang diselenggarakan oleh kuil-kuil Budha. Lembaga pendidikan ini diajarkan cara membaca, menulis dan berhitung, serta pendidikan budi pekerti (Suherman, 2004).

Sistem pendidikan di Jepang setelah Perang Dunia II berakhir, telah diubah secara menyeluruh menjadi suatu sistem yang modern dan demokratis, serta diubah pula menjadi sistem satu-jurusan yang memperlakukan kaum wanita setara dengan kaum pria. Sistem pendidikan di Jepang sebelum Perang Dunia II yaitu 6 tahun pendidikan dasar (wajib), pendidikan menengah 5 tahun, pendidikan menengah atas 3 tahun, dan pendidikan Universitas 3 tahun. Sesudah Perang Dunia II, sistem pendidikan di Jepang menurut Sidik (2011) adalah Sekolah Dasar (SD) 6 tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 tahun, Universitas 4 tahun, dan Lembaga Pendidikan Tinggi 2 tahun. Wajib belajar di Jepang mulai dari SD sampai SMP. Untuk masuk SMA dan Universitas pada dasarnya harus mengikuti ujian masuk. Selain sekolah tersebut, ada sekolah kejuruan atau sekolah khusus yang menampung lulusan SD atau SMP. Sekolah ini mengajarkan keterampilan khusus. Di samping beberapa jenjang pendidikan tersebut, di Jepang juga terdapat program pendidikan prasekolah, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak maupun Play Group.

Pembelajaran sejarah di sekolah merupakan salah satu pembelajaran yang harus dipelajari oleh siswa, bidang studi tersebut mengkaji peristiwa, permasalahan dan perkembangan masyarakat dari masa lampau sampai masa kini, baik yang terjadi di Indonesia maupun di luar Indonesia. Mempelajari sejarah berarti mempelajari hubungan antara masa lampau, masa kini dan masa yang akan datang (Afnor, 2011).

Peran siswa dalam pembelajaran mampu menggambarkan informasi dan gagasan serta menggunakan sumber-sumber belajar. Oleh karena itu, adanya kerja sama guru dan siswa dalam pembelajaran di sekolah sangat penting agar tercipta interaksi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar. Sebagai guru dituntut setiap saat untuk meningkatkan kompetensinya melalui bahan bacaan, seminar, maupun memberikan sumber-sumber belajar yang lebih kepada siswa agar dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Begitu juga sebagai siswa hendaknya dapat belajar dengan maksimal baik di waktu proses pembelajaran di kelas maupun di rumah dan dapat menambah atau menggali ilmu, informasi sebanyak-banyaknya melalui buku-buku atau media lain sebagai sumber belajar siswa secara pribadi.



KAJIAN TEORI

Sistem pendidikan merupakan suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang ada dalam proses pendidikan, di mana antara satu komponen dengan komponen yang lainnya saling berhubungan dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kebijakan pemerintah berarti suatu keputusan yang diambil, ditetapkan dan dilaksanakan yang diambil oleh seorang pelaku, kelompok atau pemerintah yang memiliki tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kesejahteraan atau kepentingan masyarakat. Menurut Agustino (2008), dampak dari kebijakan mempunyai beberapa dimensi, yaitu: 1) Pengaruhnya pada persoalan masyarakat yang berhubungan dan melibatkan masyarakat. 2) Kebijakan dapat mempunyai dampak pada situasi dan kelompok lain. 3) Kebijakan dapat mempunyai pengaruh di masa mendatang seperti pengaruhnya pada kondisi yang ada saat ini. 4) Kebijakan dapat mempunyai dampak yang tidak langsung yang merupakan pengalaman dari suatu komunitas atau beberapa anggota diantaranya.

Menurut Wicaksono (2013), pembelajaran sejarah merupakan suatu proses untuk membantu mengembangkan potensi dan kepribadian peserta didik melalui pesan-pesan sejarah agar menjadi warga bangsa yang arif dan bermartabat. Belajar sejarah dimaksudkan untuk mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam peristiwa-peristiwa sejarah yang dapat dijadikan suatu inspirasi, motivasi, pedoman atau asas-asas bagi kehidupan praktis sehari-hari baik secara perseorangan atau sebagai anggota masyarakat, bangsa dan Negara. Pembelajaran sejarah adalah segala aktivitas yang terjadi antara pendidik dan peserta didik yang dikondisikan sedemikian rupa mengenai pemahaman masa lampau secara kronologis untuk mengembangkan aspek pengetahuan, sikap, dan ketrampilan guna mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan yang tercantum dalam kurikulum pendidikan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas perpustakaan sebagai sarana untuk pengumpulan data sumber primer dan sekunder. Adapun sumber-sumber tersebut diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas Sebelas Maret Surakarta,



Perpustakaan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, dan Perpustakaan Monumen Pers Nasional Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Historis, dimana dalam prosedur penyusunannya melalui empat tahap yang harus dipenuhi dalam melakukan penelitian yaitu; heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sumber data yang digunakan adalah sumber tertulis yang meliputi buku-buku, jurnal dan sumber internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik studi pustaka. Analisa data yang digunakan adalah analisa historis yaitu analisa yang menggunakan ketajaman dalam menginterpretasi fakta sejarah.

HASIL PENELITIAN

Jepang selama kekuasaan Tokugawa menjalankan politik isolasi atau *sakoku*, khususnya disebabkan oleh rasa khawatirnya akan masuk dan pengaruhnya kaum Kristen. Sejak ia berkuasa agama Kristen dilarang dan semua orang asing dilarang masuk ke Jepang, kecuali orang Belanda yang masih boleh berdagang melalui pulau kecil Deshima di depan Nagasaki. Orang Jepang pun juga dilarang keluar negeri pada tahun 1639. *Sakoku* berarti negara tertutup, tetapi sebenarnya Jepang tidak sepenuhnya tertutup. Tokugawa kemudian makin memperketat peraturan empat kelas dalam masyarakat dan menegakkan tata hukum untuk seluruh Jepang. Garis pemisah antara samurai dengan kelas-kelas lainnya makin dipertegas. Hanya kaum samurai yang boleh memakai nama keluarga dan nama kecil serta menggunakan pedang sebanyak dua buah. Bahkan antara kelas-kelas petani, tukang dan pedagang pun diadakan pemisahan, sehingga orang tidak dapat berganti status. Selain itu, dalam pemerintahan Tokugawa, Jepang kembali memperhatikan ajaran-ajaran yang berasal dari Cina seperti ajaran Konfusius. Baru abad ke-19 kekuasaan Tokugawa mulai mengalami kemundurannya. Di kota-kota adanya ketegangan antara kaum pedagang kaya dengan rakyat miskin, sedangkan di desa-desa terjadi perbedaan antara mereka yang memiliki tanah dan yang tidak. Tetapi yang menjadi pendorong runtuhnya kekuasaan Tokugawa adalah datangnya Komodor Perry pada tahun 1853 dan memaksa Jepang untuk membuka diri (Suryohadiprojo, 1987).



Restorasi Meiji Jepang merupakan perombakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah kedaulatan nasional, sebagai sesuatu yang amat peka bagi bangsa Jepang. Pembaharuan-pembaharuan di seluruh negara pada awal periode Meiji. Pada tahun 1871, penghapusan Han dan diciptakannya Ken (Perfek), yang membentuk satuan setempat utama dalam suatu sistem pemerintah daerah yang makin memusat. Kemudian perbedaan-perbedaan golongan masyarakat dihapuskan dengan pemikiran *shimin byoudou* (kesetaraan rakyat). Pendidikan dasar umum mulai diberi prioritas, dan didirikanlah sejumlah universitas dan lembaga pendidikan menengah serta perguruan tinggi lainnya yang setingkat. Pada tahun 1877 didirikan sekolah tinggi kedokteran Tokyo, yang kemudian menjadi Universitas Tokyo pada tahun 1945. Kemudian didirikan sekolah-sekolah tinggi lainnya, seperti Keiou Juku yang kemudian menjadi Keioudaigaku, Doshishadaigaku dan Tokyo Semmongakkou yang kemudian berubah menjadi Waseda Daigaku. Setelah diperkenalkan pemikiran modern dari Eropa, maka lahirlah pemikiran kebebasan, kesetaraan, dan demokrasi di kalangan masyarakat. Pada tahun 1889 lahir *dainihon teikokukenpou* adalah undang-undang dasar kerajaan Jepang (Stockwin, 1984). Jepang pada masa Restorasi Meiji, yang dipimpin oleh kaisar Mutsuhito mendorong rakyat Jepang untuk belajar lebih tekun. Hal ini dilakukan terutama melalui para generasi muda untuk belajar ke Amerika dan Eropa sehingga nantinya dapat menyamai atau sejajar dengan keunggulan yang dimiliki bangsa-bangsa lain.

Jepang sebelum Restorasi Meiji dalam melaksanakan pendidikannya berdasarkan pada sistem masyarakat feodal, yaitu pendidikan untuk kaum atau kelompok samurai, kaum petani, para tukang, kaum pedagang, serta rakyat jelata. Kegiatan pendidikan dilaksanakan di kuil dengan bimbingan dari para pendeta Buddha yang dikenal dengan sebutan *Terakoya* (sekolah kuil). Pemerintah Jepang terus menjalankan kebijaksanaannya dengan cara mulai giat menerjemahkan dan menerbitkan buku-buku, di antaranya mengenai ilmu pengetahuan, filsafat, dan sastra. Generasi muda dikirim ke luar negeri untuk belajar sesuai dengan kemampuan bidangnya masing-masing yang bertujuan mencari ilmu dan berkeyakinan bahwa negara Jepang mampu sejajar dengan kemajuan dari dunia Barat. Jepang memang melakukan berbagai usaha serius untuk maju. Hasilnya, Jepang memiliki rakyat yang paling terdidik di kawasan Timur. Pada awal abad ke-20, sekitar 90 persen warga



Jepang sudah melek huruf. Adapun faktor yang membuat Jepang berhasil melakukan modernisasi adalah: *pertama*, ada sejumlah kekuatan pengancam yang memaksa Jepang untuk memperkuat basis militer dan ilmu pengetahuannya. Selain itu, adanya perasaan bahwa mereka itu satu bangsa dan dapat dikatakan orang Jepang adalah homogen. *Kedua*, kaisar adalah faktor penting dalam proses modernisasi tersebut (Susilo, 2009).

Pemerintah Meiji, memulai memberikan perhatian kepada pendidikan rakyatnya. Pendidikan mempunyai dasar yang baik untuk didorong lebih maju. Di bidang pendidikan, pemerintah mengambil langkah-langkah yang positif untuk memberitahu seluas mungkin keadaan yang dihadapi Jepang, dan mengembangkan dengan luas pendidikan rakyat. Pada tahun 1872, satu Undang-Undang tentang Pendidikan Umum ditetapkan, dengan sistem pendidikan baru, menggantikan sistem lama yang berdasar “*Kepatuhan Konfusianisee*” dengan sistem azas manfaat (*utilitarisme*) yang diperoleh dari Barat. Peranan Surat kabar, memang amat besar juga. Biaya pos amat direndahkan bagi pengiriman surat-surat kabar. Tidak dipungut biaya bagi pengiriman naskah kepada penerbit surat kabar. Selama periode Tokugawa, setiap tanah yang luas mempunyai sekolah-sekolah untuk mendidik *Samurai* dan anak-anaknya. Banyak kelenteng dan kuil yang mempunyai sekolah-sekolah. Diperkirakan kurang lebih 40% orang dewasa laki-laki dapat membaca dan menulis pada waktu Restorasi. Reformasi pendidikan menjadi sesuatu yang penting dan serius masalahnya sesudah Perang Dunia ke-II. Pejabat-pejabat Pendudukan menghendaki reform yang penting dan cermat dalam bidang pendidikan. Jadi satu sistem persekolahan baru, terdiri atas Sekolah Dasar, 6 tahun; Sekolah Menengah, 3 tahun; dan Sekolah Menengah Atas, 6 tahun; serta *College* (Sekolah Tinggi), 4 tahun. Orang Jepang menerima baik diadakannya “kewajiban belajar” (*compulsory education*) dari enam menjadi sembilan tahun, tetapi tidak terlalu senang mengenai sistem baru untuk Pendidikan Tinggi (Mattulada, 1979).

Pendidikan di Jepang sudah ada sebelum masa Meiji. Pada masa Tokugawa *Bakufu* (1603-1867) atau yang lebih dikenal dengan sebutan zaman *Edo* terdapat lembaga-lembaga pendidikan, mengadakan sekolah-sekolah yang hanya untuk anak-anak dari kalangan *Samurai*. Sedangkan untuk rakyat biasa lembaga pendidikannya disebut *terakoya* yang diselenggarakan oleh kuil-kuil Budha. Lembaga pendidikan ini



diajarkan cara membaca, menulis dan berhitung, serta pendidikan budi pekerti (Suherman, 2004). Pada tahun 1854 ketertutupan diri Jepang atau yang disebut politik isolasi, berhasil dibuka oleh Amerika dan sejak 1868 mulailah dilakukan pembaharuan di Jepang. Pembaharuan ini dikenal dengan sebutan *Restorasi Meiji*, ditandai berakhirnya kekuasaan Tokugawa dengan pemerintahan Bakufu-nya. Kekuasaan kemudian diserahkan kembali pada Tenno (kaisar), yang pada waktu itu adalah Mutsuhito. Restorasi Meiji merupakan akibat langsung dari dibukanya Jepang atas kedatangan kapal dari Amerika Serikat yang dipimpin oleh perwira angkatan laut yang bernama Matthew Perry. Restorasi Meiji membawa suatu perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Jepang terutama dalam pendidikan.

Sistem pendidikan sebelum Perang Dunia II, anak-anak masuk Sekolah Dasar pada umur enam tahun, dan pendidikan selama enam tahun yang sifatnya wajib (*compulsory*). Beberapa dari mereka belajar dua tahun lebih lama di Sekolah Dasar, kemudian terjun ke masyarakat. Tetapi hampir 40% dari mereka memasuki SMP yang dipisahkan antara anak laki-laki dan wanita yang umumnya pelajaran berlangsung selama lima tahun. Di samping SMP ini ada beberapa macam pendidikan khusus termasuk sekolah ekonomi, sekolah teknik, dan sekolah normal untuk mendidik calon-calon guru SD. Sesudah tamat dari SMP anak-anak memiliki kesempatan untuk memilih pendidikan yang lebih tinggi pada usia 17 tahun. Sekolah Menengah Tingkat Atas adalah Sekolah Menengah Atas Nasional selama tiga tahun. Di samping itu ada beberapa sekolah swasta dan sekolah-sekolah Pemerintah Daerah. Sekolah-sekolah ini secara tertutup melayani kelompok elite, dan terdiri dari dua macam yakni Sastra dan IPA. Sekolah Teknik tingkat Atas dan Sekolah Ekonomi tingkat Atas memberikan tiga tahun latihan profesional sesudah sekolah menengah.

Pendidikan pada masa Meiji dilaksanakannya sistem pendidikan yang disebut *Gakusei* yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Jepang (1872) yang memuat rencana sistem pendidikan secara umum. Sistem pendidikan tersebut diatur dan dilaksanakan seluruhnya oleh Departemen Pendidikan yang sekaligus juga membuat kurikulum dan buku pelajaran berdasarkan buku-buku Barat yang diberlakukan sama untuk seluruh Jepang. Dengan pedoman sistem pendidikan Barat ini diadakan pembangunan Sekolah Dasar sekitar 53.000 buah yang menerapkan sistem pendidikan Barat bagi anak-anak yang berusia 8 tahun hingga 14 tahun. Selain itu dibangun pula



sekolah menengah dan universitas-universitas (Rustam, 2003). Sesuai dengan data dari Mikiso (1992) bahwa menjelang akhir masa Taisho yaitu sekitar 1925, di seluruh Jepang terdapat 34 universitas, 29 sekolah menengah tingkat atas, dan 84 sekolah profesional. Sekolah menengah tingkat pertama khusus untuk laki-laki mengalami peningkatan yang signifikan 218 pada 1900 menjadi 491 pada 1924. Sekolah menengah pertama kaum wanita mengalami loncatan yang cukup berarti, yakni dari 52 sekolah pada 1900 menjadi 576 sekolah pada 1924. Dengan melihat data-data tersebut, dapat dilihat bahwa masyarakat Jepang pada 1920-an sudah banyak yang menikmati dunia pendidikan. Banyaknya orang yang mengenyam pendidikan dengan sendirinya tenaga kerja yang terserap di berbagai lapangan kerja adalah para pekerja yang berpendidikan dan berkualitas (Suherman, 2004: 206).

Statistik berikut akan memperlihatkan betapa hebat upaya kependidikan yang diadakan pada zaman Meiji. Ketika menghadapi pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat, presentasi anak-anak usia sekolah yang menerima pendidikan dasar naik dari 25 persen di tahun 1871 menjadi 46 persen di tahun 1886 dan 95 persen di tahun 1906. Pendidikan menengah yang berjalan dengan baik sampai abad ke-20, tetap menjadi hak istimewa bagi segelintir golongan, tetapi, pertumbuhannya agak kurang dramatis. Tahun 1873, hanya ada 20 sekolah menengah, sedangkan pada 1901 ada 216 sekolah menengah untuk putra dan 70 sekolah menengah untuk putri. Perluasan yang sama dapat dibuktikan pula pada pendidikan tinggi, pendidikan kejuruan, pendidikan masyarakat, dan pendidikan khusus. Perpustakaan, museum, dan institusi lain terlibat secara langsung dan tidak langsung dengan pendidikan kaum muda dan masyarakat yang juga berkembang dengan pesat (Thut & Adams, 2005).

Jepang pada masa pendudukan Sekutu (Amerika Serikat) berkuasa selama tahun 1945 hingga 1952. Dalam membantu Jepang merumuskan kembali tujuan pendidikannya, SCAP sangat mengandalkan rekomendasi Misi Pendidikan Amerika Serikat (*United State Educational Mission*), sebuah kelompok yang beranggotakan ahli pendidikan Amerika ternama yang telah diundang SCAP untuk mempelajari kebutuhan pendidikan Jepang selepas perang. Di bawah kepemimpinan pihak Amerika, empat langkah dasar diambil untuk membantu realisasi gagasan ini: 1) Reorganisasi sistem banyak-jalur (*multiple-track system*) menjadi sistem satu-jalur (*single-track system*) bersamaan dengan perluasan pendidikan wajib, 2) ketetapan untuk pendidikan bersama



antara pria dan wanita, 3) pengadaan pendidikan paruh-waktu dan pendidikan koresponden (lewat surat-menyurat), 4) mengatur kembali pendidikan tinggi termasuk memulai sistem *junior college*.

Konsep pendidikan yang egalitarian di Jepang ini menunjukkan angka pertumbuhan siswa Jepang yang melanjutkan pendidikan pun meningkat. Menurut pernyataan Inagaki (1984), siswa SMP yang melanjutkan ke SMA pada tahun 1945 melebihi 50%, tahun 1964 sebanyak 69,3%, tahun 1974 sebanyak 90,8%, dan tahun 1981 sebanyak 94,3%. Dan siswa SMA yang melanjutkan ke tingkat perguruan tinggi yaitu, pada tahun 1945 sebanyak 10,1%, tahun 1964 sebanyak 19,9%, tahun 1974 sebanyak 34,7%, dan tahun 1976 sebanyak 38,6% (Setiawati, 2012:2).

Sistem persekolahan di Jepang pada dasarnya meliputi sekolah dasar (enam tahun), sekolah menengah pertama (tiga tahun), sekolah menengah atas (tiga tahun) dan universitas (empat tahun). Pendidikan bersifat wajib hanya selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah. Sebagian besar siswa meneruskan pendidikannya ke sekolah menengah atas. Untuk masuk sekolah menengah atas dan universitas, siswa harus mengikuti ujian masuk dulu. Di sekolah negeri, selama pendidikan wajib, para siswa bebas uang sekolah dan mendapat buku-buku pelajaran secara gratis. Tapi, mereka membayar biaya makan siang dan uang ekstrakurikuler.

Pengajaran sejarah di sekolah bertujuan agar siswa memperoleh kemampuan untuk berpikir historis dan pemahaman sejarah. Melalui pengajaran sejarah, siswa mampu mengembangkan kompetensi untuk berpikir secara kronologis dan memiliki pengetahuan tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk memahami dan menjelaskan proses perkembangan dan perubahan masyarakat serta keragaman sosial budaya dalam rangka menemukan dan menumbuhkan jati diri bangsa di tengah-tengah kehidupan masyarakat dunia (Agung & Sri Wahyuni, 2013). Pembelajaran Sejarah bukan bertujuan untuk memenuhi ingatan para siswa dengan berbagai fakta dan materi yang harus dihafalkan, melainkan untuk membina mental yang sadar akan tanggung jawab terhadap hak dirinya sendiri dan kewajiban kepada masyarakat, bangsa dan negara (Wartoyo, 2008).

Relevansi hasil penelitian termasuk dalam KD 3.9 Menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan



Jepang. Kebijakan dan perkembangan pendidikan di negara Jepang dikaitkan dalam materi kebangkitan heroisme dan kebangsaan Indonesia pada zaman pendudukan atau penjajahan Jepang pada khususnya pengaruh bidang pendidikan bagi Indonesia. Materi Sejarah di atas terdapat atau dipelajari di sekolah tingkat SMA kelas XI (sebelas) yang sesuai dengan Kurikulum 2013. Dengan hasil penelitian tersebut, diharapkan dapat menambah proses pendalaman materi Sejarah Peminatan di kelas XI (sebelas) dan dapat digunakan sebagai sumber tambahan bagi para siswa.

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian Perkembangan pendidikan di negara Jepang pasca Perang Dunia II dan relevansinya terhadap pembelajaran sejarah di sekolah menengah atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Restorasi Meiji Jepang merupakan perombakan segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah kedaulatan nasional, dan membawa suatu perubahan yang besar dalam kehidupan bangsa Jepang terutama dalam pendidikan. Jepang sebelum masa Meiji sudah ada lembaga pendidikan yang disebut *Terakoya* yang berarti sekolah yang diselenggarakan di kuil-kuil Budha. Sistem pendidikan di Jepang sebelum Perang Dunia II, yaitu 6 tahun pendidikan dasar (wajib), pendidikan menengah 5 tahun, pendidikan menengah atas 3 tahun, dan pendidikan Universitas 3 tahun. Tujuan pendidikan moral di sekolah sebelum Perang Dunia II masih dipengaruhi oleh tujuan pendidikan moral pada zaman Meiji yaitu ditujukan sebagai alat untuk menanamkan nasionalisme, mengajarkan siswa mengenai tanggung jawab, dan mengajarkan kebudayaan serta tradisi Jepang.
2. Sistem pendidikan di Jepang setelah Perang Dunia II pada dasarnya meliputi sekolah dasar (enam tahun), sekolah menengah pertama (tiga tahun), sekolah menengah atas (tiga tahun) dan universitas (empat tahun). Pendidikan bersifat wajib hanya selama sembilan tahun, yaitu enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah. Tujuan pendidikan moral sesudah Perang Dunia II adalah lebih menitikberatkan pada pendidikan yang bersifat menumbuhkan manusia Jepang yang saling menghormati dan menghargai antar manusia.



3. Relevansi hasil penelitian termasuk dalam KD 3.9 Menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang. Kebijakan dan perkembangan pendidikan di negara Jepang dikaitkan dalam materi kebangkitan heroisme dan kebangsaan Indonesia pada zaman pendudukan atau penjajahan Jepang pada khususnya pengaruh bidang pendidikan bagi Indonesia. Materi Sejarah di atas terdapat atau dipelajari di sekolah tingkat SMA kelas XI (sebelas) yang sesuai dengan Kurikulum 2013.

SARAN

Berdasarkan simpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Bagi Guru

Guru Sejarah diharapkan dapat menambah pengetahuan kesejarahan terutama sejarah luar negeri mengenai pendidikan dan perkembangannya yang terjadi di negara Jepang pasca Perang Dunia II. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran sejarah jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas kelas XI. Hasil penelitian berkaitan dengan kompetensi dasar “menganalisis kehidupan sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan di Indonesia pada zaman pendudukan Jepang.”

2. Bagi Siswa

Siswa di sekolah tingkat SMA diharapkan agar lebih banyak lagi siswa yang mampu menambah atau memperdalam pengetahuan mengenai pendidikan di negara Jepang pasca Perang Dunia II. Dalam pembelajaran sejarah, pembahasan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh siswa. Dan juga siswa dapat meneladani orang-orang Jepang yang tidak pantang menyerah untuk berusaha meningkatkan kemajuan negaranya, dengan sikap disiplin yang tinggi dan kerja keras demi tujuan yang hendak dicapai.

3. Bagi Peneliti Lain

Peneliti sejarah yang ingin meneliti tentang negara Jepang atau pendidikan di negara Jepang, masih banyak aspek lain yang menarik dan belum dibahas secara



mendalam. Oleh karena itu bagi peneliti yang tertarik untuk meneliti tema-tema lain, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan inspirasi bagi para peneliti selanjutnya mengenai negara Jepang dalam aspek dan segi pandang tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnor, A. (2011). *Pembelajaran Sejarah*. Diperoleh 23 Mei 2014 dari <http://andikaafnor.blogspot.com/2011/10/pembelajaran-sejarah.html>.
- Agung, L & dan Wahyuni, S. 2013. *Perencanaan Pembelajaran Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mattulada. (1979). *Pedang dan Sempoa (Suatu Analisa Kultural "Perasaan Kepribadian" Orang Jepang)*. Jakarta: Depdikbud.
- Rustam, F. (2003). Reformasi Pendidikan Pada Masa Jepang Meiji: Studi tentang Peran Politik Kekuasaan dalam Penerapan Pendidikan. *Makara, Sosial Humaniora*, 7 (2), 45-48.
- Setiawati, AS. (2012). *Pendidikan Jepang yang Egalitarian*. Diperoleh 20 Mei 2015, dari <http://www.pendidikanbahasajepang-unnes.com/2012/06/pendidikan-jepang-yang-egalitarian.html>
- Stockwin, J. A. A. (1984). *Pluralisme Politik dan Ekonomi Jepang*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suherman, E. (2004, Juni). Dinamika Masyarakat Jepang dari Masa Edo hingga Pasca Perang Dunia II. *Humaniora*, 16 (2), 201-210. Diperoleh 9 Februari 2013, dari <http://isjd.pdii.lipi.go.id/admin/jurnal/@Dinamika%20Masyarakat%20Jepang%20Dari%20Masa%20Edo%20Hingga%20Pascaperang%20Dunia%20II.pdf>.
- Susilo, T.A. (2009). *Spirit Jepang: 30 Inspirasi & Kunci Sukses Orang-Orang Jepang*. Yogyakarta: GARASI.
- Suryohadiprojo, S. (1982). *Belajar dari Jepang: Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup*. Jakarta: UI-Press.
- Wartoyo, F.X. (2008). *Pembelajaran Sejarah di Kelas X Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus di SMA Regina Pacis)*. Skripsi Tidak Dipublikasikan. Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Thut, I.N & Adams, D. (2005). *Pola-Pola Pendidikan Dalam Masyarakat Kontemporer*. Penerjemah: SPA Teamwork. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wicaksono, D. (2013). *Konsep Pembelajaran Sejarah*. Diperoleh 20 Mei 2014 dari <http://dirgantarawicaksono.blogspot.com/2013/06/konsep-pembelajaran-sejarah.html>.
- Zulkarnain, D. (2008). *Potret Westernisasi di Jepang*. Diperoleh 30 April 2014 dari http://digital_127200-RB08Z432p-Potret-westernisasi-Analisis.pdf.